P-ISSN : 2964-0628
E-ISSN : 2963-4261
Vol. No. Yr : 2-2-2023
pp : 118-131

Editorial Office: Jl. Tebet Raya No. 2 Fl. 3 Block C, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia.
Website: https://scientium.co.id/journals/index.php/jsdi
E-mail: journal@scientium.co.id

Dari Pajak hingga SDGs: Pentingnya Bahasa yang Jelas

Mochamad Nuruz Zaman
Politeknik Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia
Email: mzaman@mesin.pnj.ac.id

Article Info

Keywords:
transparansi linguistik; komunikasi pajak; bahasa hukum; pelaporan akuntansi; SDGs.

History of Article
Received: March 26, 2023;
Reviewed: August 19, 2023;
Accepted: December 23, 2023;
Published: December 30, 2023

DOI:
https://doi.org/10.56282/jsdi.v2i2.611

Abstract

Transparansi linguistik didefinisikan bukan sekadar penggunaan kalimat pendek, melainkan kemampuan teks kelembagaan untuk membantu audiens menemukan, memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara benar dalam konteks keputusan yang nyata. Melalui sintesis literatur dan dokumen kebijakan, artikel ini menunjukkan bahwa bahasa yang kabur, teknokratis, hiperlegalistik, atau terlalu promosi melemahkan kepercayaan, kepatuhan sukarela, akuntabilitas, dan partisipasi. Sebaliknya, bahasa yang jelas, tertata, dapat ditelusuri, dan jujur mengenai ketidakpastian memperkuat kontrak sosial antara negara, pasar, dan masyarakat. Kebaruan kajian ini terletak pada penyusunan model konseptual *Linguistic Transparency for Sustainable Governance* (LTSG), yang mengintegrasikan lima dimensi: kejelasan leksikal-sintaktik, keterlacakan semantik, kegunaan pragmatik, inklusivitas diskursif, dan akuntabilitas naratif. Model ini menempatkan bahasa sebagai infrastruktur governance, setara dengan data, prosedur, dan institusi. Dapat disimpulkan bahwa reformasi tata kelola tidak cukup ditempuh melalui digitalisasi, keterbukaan data, atau penambahan kewajiban pelaporan; reformasi tersebut harus disertai audit bahasa, desain komunikasi yang berorientasi pengguna, serta mekanisme evaluasi keterpahaman lintas kelompok. Saran utama penelitian adalah agar regulator, otoritas pajak, pembentuk undang-undang, penyusun laporan keuangan/keberlanjutan, dan pengelola komunikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) mengadopsi standar bahasa jelas tanpa mengorbankan presisi teknis,

	dengan prosedur uji pengguna dan pengungkapan *trade-off* yang eksplisit.

©2022. This work is licensed under a CC BY 4.0 license.

A. Pendahuluan

Tata kelola berkelanjutan sering dibicarakan melalui indikator kelembagaan: integritas, kepatuhan hukum, efektivitas pelayanan, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan fiskal. Namun, setiap indikator tersebut pada akhirnya dihubungkan kepada warga melalui bahasa. Peraturan pajak menjadi kewajiban karena tertulis dan dijelaskan; hak hukum menjadi dapat digunakan karena rumusannya dapat dipahami; laporan akuntansi menjadi dasar keputusan karena narasinya memberi konteks atas angka; dan SDGs menjadi agenda publik karena diterjemahkan ke dalam pesan yang membuat orang peduli dan bertindak. Dengan demikian, bahasa bukan lapisan dekoratif setelah kebijakan selesai dibuat, tetapi bagian dari desain kebijakan itu sendiri.

Masalahnya, banyak dokumen publik masih menganggap transparansi sebagai persoalan menyediakan dokumen atau membuka data. Informasi memang mungkin tersedia, tetapi tidak otomatis dapat dipahami. Situs pemerintah dapat memuat peraturan, tetapi istilahnya asing bagi warga. Laporan keberlanjutan dapat menyajikan puluhan indikator, tetapi pembaca tidak selalu mengetahui implikasi sosialnya. Laporan keuangan dapat memenuhi standar teknis, tetapi narasi manajemen dapat menyamarkan risiko. Dalam situasi seperti itu, keterbukaan berubah menjadi kepadatan informasi yang sulit diproses. Kelebihan informasi, jargon, dan struktur dokumen yang berbelit dapat menghasilkan ketertutupan baru di tengah bentuk keterbukaan formal.

Kecenderungan global menunjukkan meningkatnya kompleksitas kebijakan publik. Pajak digital, instrumen keuangan baru, perubahan iklim, rantai pasok global, kecerdasan buatan, dan pengungkapan keberlanjutan menghadirkan konsep yang sulit sekaligus berdampak luas. Kompleksitas substansi tidak dapat dihapus begitu saja. Akan tetapi, kompleksitas substansi tidak boleh menjadi alasan untuk memproduksi komunikasi yang tidak dapat digunakan. Tantangan tata kelola modern adalah menjaga keseimbangan antara presisi teknis dan keterpahaman publik.

Di bidang pajak, kompleksitas bahasa berhubungan dengan kepatuhan. Banyak wajib pajak tidak berniat menghindar, tetapi gagal memahami prosedur, tenggat, definisi objek pajak, atau konsekuensi administratif. OECD pernah menyoroti bahwa otoritas pendapatan sering lebih banyak membatasi peluang ketidakpatuhan daripada membuat kepatuhan menjadi mudah. Salah satu cara mengurangi ketidakpatuhan tidak disengaja adalah penggunaan bahasa sederhana dalam komunikasi dan penyederhanaan formulir serta hukum pajak sejauh mungkin.[1] Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa bahasa dapat menjadi instrumen kepatuhan yang lebih murah dan lebih etis daripada sekadar penegakan berbasis sanksi. Tax morale juga memperlihatkan relasi antara bahasa, keadilan, dan kontrak sosial. OECD mendefinisikan tax morale sebagai kemauan intrinsik untuk membayar pajak dan menghubungkannya dengan faktor sosio-ekonomi serta institusional, termasuk kualitas layanan publik dan kepercayaan terhadap pemerintah.[2] Apabila warga tidak memahami mengapa mereka membayar, bagaimana kewajiban dihitung, dan untuk apa dana digunakan, hubungan pajak berubah menjadi hubungan

[1] OECD, Understanding and Influencing Taxpayers' Compliance Behaviour (Paris: OECD Publishing, 2012), 5.

[2] OECD, Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax? (Paris: OECD Publishing, 2019), https://doi.org/10.1787/f3d8ea10-en.

koersif. Transparansi linguistik dapat memperkuat persepsi bahwa negara tidak hanya menagih, tetapi juga menjelaskan, mendengar, dan bertanggung jawab.[3]

Di bidang hukum, bahasa adalah pintu masuk terhadap kepastian hukum. Hukum yang berlaku umum tetapi tidak dapat dipahami secara umum menimbulkan paradoks demokratis: norma mengikat warga, tetapi maknanya dikuasai oleh kelompok ahli. Literatur legal language sejak Mellinkoff[4] dan Tiersma[5] telah menunjukkan bahwa bahasa hukum memiliki sejarah, kebiasaan, dan struktur profesional yang sering menjauh dari bahasa warga biasa. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah memuat asas kejelasan rumusan dan tuntutan agar bahasa hukum jelas serta mudah dimengerti agar tidak menimbulkan berbagai interpretasi.6 Dengan kata lain, transparansi linguistik bukan gagasan asing, melainkan mandat yang perlu dioperasionalkan.

Di bidang akuntansi, permasalahan yang muncul bukan hanya angka, tetapi juga narasi. Kerangka Konseptual IASB menempatkan relevansi dan representasi tepat sebagai karakteristik fundamental informasi keuangan, sementara keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman menjadi karakteristik peningkat kegunaan informasi.[7] Literatur empiris menunjukkan bahwa keterbacaan laporan tahunan berkorelasi dengan kinerja dan kualitas informasi.[8] Laporan yang lebih kompleks dapat memperlambat reaksi investor atau menurunkan kemampuan pasar memproses informasi.[9] Oleh karena itu, bahasa laporan keuangan dan pengungkapan keberlanjutan adalah bagian dari mekanisme pasar yang adil.

Di bidang SDGs, komunikasi menghadapi tantangan yang berbeda. SDGs bersifat universal, tetapi implementasinya lokal. Agenda 17 tujuan dan ratusan indikator dapat terasa abstrak bagi warga jika tidak diterjemahkan ke dalam masalah yang dekat: air bersih, kualitas udara, akses keadilan, pelayanan kesehatan, pekerjaan layak, dan ketahanan kota. Laporan SDGs resmi menunjukkan bahwa kemajuan global masih menghadapi hambatan serius; pada saat yang sama, komunikasi yang efektif diperlukan agar data kemajuan tidak berhenti menjadi statistik, melainkan menjadi dasar partisipasi dan koreksi kebijakan.[10]

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah penelitian konseptual ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana transparansi linguistik dapat didefinisikan sebagai prasyarat tata kelola berkelanjutan; (2) bagaimana bukti dari komunikasi pajak, hukum, akuntansi, dan SDGs menunjukkan peran bahasa dalam kepercayaan, kepatuhan, akuntabilitas, dan partisipasi; (3) dimensi konseptual apa yang dapat dipakai untuk menilai transparansi

---

[3] International Organization for Standardization, ISO 24495-1:2023, Plain Language—Part 1: Governing Principles and Guidelines (Geneva: ISO, 2023); International Plain Language Federation, "Plain Language Definitions," diakses 24 Juni 2026, https://www.iplfederation.org/plain-language-definitions/.

[4] David Mellinkoff, The Language of the Law (Boston: Little, Brown and Company, 1963).

[5] Peter M. Tiersma, Legal Language (Chicago: University of Chicago Press, 1999).

[6] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terutama asas kejelasan rumusan dan Lampiran II mengenai bahasa peraturan perundang-undangan.

[7] International Accounting Standards Board, Conceptual Framework for Financial Reporting (London: IFRS Foundation, 2018).

[8] Feng Li, "Annual Report Readability, Current Earnings, and Earnings Persistence," Journal of Accounting and Economics 45, nos. 2-3 (2008): 221-247, https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2008.02.003.

[9] Haifeng You and Xiao-jun Zhang, "Financial Reporting Complexity and Investor Underreaction to 10-K Information," Review of Accounting Studies 14, no. 4 (2009): 559-586, https://doi.org/10.1007/s11142-008-9083-2.

[10] United Nations Statistics Division, The Sustainable Development Goals Report 2025 (New York: United Nations, 2025).

linguistik lintas bidang; dan (4) bagaimana batasan serta rekomendasi implementasinya agar bahasa jelas tidak berubah menjadi penyederhanaan yang menyesatkan.

B. Kerangka Konseptual

Transparansi linguistik dalam artikel ini didefinisikan sebagai kualitas komunikasi kelembagaan yang membuat informasi penting dapat ditemukan, dipahami, diperiksa, dan digunakan oleh audiens yang dituju tanpa kehilangan akurasi teknis. Definisi ini menempatkan transparansi linguistik pada titik temu antara bahasa, desain dokumen, akuntabilitas, dan pengalaman pengguna. Ia bukan sinonim dari bahasa populer, bukan pula penolakan terhadap istilah teknis. Istilah teknis tetap dapat digunakan apabila diperlukan, tetapi harus diberi konteks, definisi, contoh, dan konsekuensi tindakan.

Kerangka LTSG memiliki lima dimensi. Pertama, kejelasan leksikal-sintaktik: penggunaan kata, kalimat, dan struktur paragraf yang mengurangi beban kognitif. Kedua, keterlacakan semantik: konsistensi istilah, definisi, rujukan, dasar data, dan hubungan antara klaim dengan bukti. Ketiga, kegunaan pragmatik: kemampuan teks membimbing audiens melakukan tindakan yang tepat, seperti mengisi formulir, mengajukan keberatan, membaca risiko, atau berpartisipasi dalam program. Keempat, inklusivitas diskursif: penyesuaian komunikasi terhadap kelompok dengan kemampuan literasi, bahasa, akses digital, dan kebutuhan disabilitas yang berbeda. Kelima, akuntabilitas naratif: keberanian teks menyampaikan batasan, trade-off, ketidakpastian, dan risiko secara seimbang. Kelima dimensi tersebut membentuk rantai logis. Kejelasan membantu pembaca mengurai pesan; keterlacakan membantu pembaca memeriksa makna; kegunaan membantu pembaca bertindak; inklusivitas memastikan kelompok yang berbeda tidak tersingkir; dan akuntabilitas naratif mencegah komunikasi berubah menjadi propaganda, legal cover, atau greenwashing. Karena itu, transparansi linguistik lebih dekat dengan etika komunikasi publik daripada sekadar teknik penyuntingan.

Model konseptual artikel ini dapat diringkas sebagai berikut: kompleksitas kebijakan menghasilkan kebutuhan komunikasi; kualitas komunikasi ditentukan oleh lima dimensi transparansi linguistik; transparansi linguistik memengaruhi kepercayaan, kepatuhan, partisipasi, dan kualitas keputusan; keempat keluaran tersebut memperkuat tata kelola berkelanjutan. Dengan demikian, bahasa berperan sebagai mekanisme perantara antara desain institusi dan hasil governance.

C. Hasil dan Pembahasan

Literatur *plain language* berkembang dari kebutuhan praktis agar dokumen pemerintah, bisnis, dan hukum dapat dipakai oleh pembaca yang bukan ahli. SEC menerbitkan A Plain English Handbook pada 1998 sebagai panduan untuk pengungkapan yang lebih jelas bagi investor.[11] Aturan plain English SEC menuntut bagian depan prospektus, ringkasan, dan faktor risiko menggunakan prinsip seperti kalimat pendek, bahasa konkret sehari-hari, suara aktif, tabel untuk informasi kompleks, dan penghindaran jargon hukum atau bisnis yang tidak perlu.[12] Studi

[11] U.S. Securities and Exchange Commission, A Plain English Handbook: How to Create Clear SEC Disclosure Documents (Washington, DC: SEC, 1998).

[12] U.S. Securities and Exchange Commission, "Plain English Disclosure," Securities Act Release No. 33-7497, 1998, diakses 24 Juni 2026, https://www.sec.gov/rules-regulations/1998/01/plain-english-disclosure.

Loughran dan McDonald mengenai dampak regulasi plain English menunjukkan bahwa kebijakan bahasa dapat menjadi intervensi pasar modal, bukan sekadar pedoman redaksi.[13]

Dalam literatur hukum, perdebatan berpusat pada ketegangan antara presisi dan keterpahaman. Legalese sering dipertahankan karena dianggap menjaga kontinuitas makna, efisiensi antarpraktisi, dan kepastian. Namun tradisi itu dapat menghasilkan hambatan akses keadilan. Mellinkoff[14] dan Tiersma[15] menelusuri bagaimana bahasa hukum dibentuk oleh sejarah profesi, istilah arkais, formula baku, dan struktur kalimat yang berbeda dari komunikasi biasa. Reformasi bahasa hukum tidak berarti menghapus semua istilah teknis; reformasi berarti membedakan istilah yang memang membawa presisi dari kebiasaan yang hanya mempertahankan jarak sosial.

Dalam literatur akuntansi, readability menjadi variabel penting karena laporan perusahaan menggabungkan data numerik dan narasi. Li menemukan hubungan antara keterbacaan laporan tahunan dan kinerja serta persistensi laba,[16] sedangkan Loughran dan McDonald mengkritik penggunaan formula keterbacaan umum dalam konteks keuangan dan mengusulkan pendekatan yang lebih sesuai dengan kosakata bisnis.[17] You dan Zhang menunjukkan bahwa kompleksitas laporan 10-K berhubungan dengan underreaction investor terhadap informasi, yang mengindikasikan bahwa bahasa dapat memengaruhi kecepatan pasar menyerap informasi.[18] Literatur ini memperkuat tesis bahwa kualitas bahasa memiliki konsekuensi ekonomi.

Dalam pelaporan keberlanjutan, GRI 1: Foundation 2021 menempatkan transparansi sebagai tujuan pelaporan: organisasi mengungkapkan dampak signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia agar akuntabilitas meningkat dan pengguna dapat membuat penilaian serta keputusan yang lebih baik.[19] IFRS S1 kemudian menghubungkan pengungkapan keberlanjutan dengan keputusan pengguna laporan keuangan umum, terutama mengenai risiko dan peluang keberlanjutan yang dapat memengaruhi arus kas, akses pendanaan, atau biaya modal.[20] Di Indonesia, POJK 51/POJK.03/2017 mendorong penerapan keuangan berkelanjutan dan laporan keberlanjutan oleh lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.[21] Ketiga kerangka ini menunjukkan konvergensi antara bahasa akuntansi, bahasa keberlanjutan, dan governance.

Dalam komunikasi SDGs, tantangan utama adalah menerjemahkan agenda global ke dalam konteks nasional dan lokal tanpa menghilangkan integrasi antar tujuan. UNSD menyediakan metadata indikator untuk memperjelas definisi dan metode pengukuran indikator SDGs.[22]

---

[13] Tim Loughran and Bill McDonald, "Regulation and Financial Disclosure: The Impact of Plain English," Journal of Regulatory Economics 45, no. 1 (2014): 94-113, https://doi.org/10.1007/s11149-013-9236-5.

[14] David Mellinkoff, Ibid.

[15] Peter M. Tiersma, Ibid.

[16] Feng Li, Ibid.

[17] Tim Loughran and Bill McDonald, "Measuring Readability in Financial Disclosures," Journal of Finance 69, no. 4 (2014): 1643-1671, https://doi.org/10.1111/jofi.12162.

[18] Haifeng You and Xiao-jun Zhang, "Financial Reporting Complexity and Investor Underreaction to 10-K Information," Review of Accounting Studies 14, no. 4 (2009): 559-586, https://doi.org/10.1007/s11142-008-9083-2.

[19] Global Reporting Initiative, GRI 1: Foundation 2021 (Amsterdam: Global Reporting Initiative, 2021).

[20] IFRS Foundation, "IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information," issued June 2023, effective 1 January 2024, diakses 24 Juni 2026, https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s1-general-requirements/.

[21] Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, 2017.

[22] United Nations Statistics Division, "SDG Indicators: Metadata Repository," diakses 24 Juni 2026, https://unstats.un.org/sdgs/metadata/.

UNSDG menerbitkan pedoman komunikasi bersama agar tim negara PBB dapat memanfaatkan komunikasi untuk membuat orang peduli dan bertindak terhadap SDGs.[23] Literatur dan pedoman ini menempatkan komunikasi bukan sekadar diseminasi, melainkan instrumen mobilisasi publik.

Literatur open government memperkuat peran bahasa. World Justice Project memandang pemerintah terbuka sebagai pemerintah yang berbagi informasi, mendorong partisipasi, dan memberdayakan orang dengan alat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah.[24] OECD Report on Public Communication menegaskan bahwa komunikasi publik dapat berkontribusi pada kebijakan dan layanan yang lebih baik, kepercayaan warga, dan demokrasi yang lebih kuat.[25] Keduanya mengandaikan bahwa informasi tidak hanya tersedia, tetapi dapat diproses oleh warga sebagai dasar tindakan kolektif dan kontrol publik.

Sebagai penelitian konseptual, hasil utama artikel ini adalah sintesis model dan proposisi, bukan temuan statistik. Hasil pertama adalah bahwa transparansi linguistik harus dipahami sebagai infrastruktur tata kelola. Dalam empat ranah yang dikaji, bahasa tidak berdiri setelah substansi, tetapi menjadi syarat agar substansi dapat bekerja. Pajak membutuhkan bahasa agar kewajiban menjadi dapat dipatuhi, hukum membutuhkan bahasa agar norma menjadi dapat diprediksi, akuntansi membutuhkan bahasa agar angka menjadi dapat ditafsirkan, dan SDGs membutuhkan bahasa agar tujuan global menjadi agenda partisipatif.

Hasil kedua adalah bahwa transparansi linguistik memiliki efek ganda: meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan dan membatasi oportunisme institusi. Di sisi pengguna, bahasa yang jelas mengurangi biaya pencarian informasi, biaya interpretasi, dan risiko kesalahan tindakan. Di sisi institusi, bahasa yang jelas membuat alasan keputusan, asumsi, metode, dan risiko lebih mudah diperiksa. Karena itu, transparansi linguistik tidak hanya meningkatkan pelayanan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas.

Hasil ketiga adalah bahwa setiap domain memiliki bentuk ketidaktransparanan yang khas. Dalam pajak, ketidaktransparanan muncul sebagai formulir rumit, istilah yang tidak dijelaskan, dan penjelasan kewajiban yang terpisah dari manfaat publik. Dalam hukum, ia muncul sebagai kalimat panjang, rujukan silang berlapis, definisi tidak konsisten, dan gaya otoritatif yang tidak memberi alasan. Dalam akuntansi, ia muncul sebagai narasi defensif, disclosure overload, istilah teknis tanpa konteks, serta pemisahan antara angka dan cerita risiko. Dalam SDGs, ia muncul sebagai slogan normatif, indikator tanpa cerita, atau pesan kampanye yang tidak mengakui trade-off.

Hasil keempat adalah bahwa bahasa jelas memiliki batas. Keterpahaman tidak boleh menggantikan presisi; ringkasan tidak boleh menggantikan dokumen utama; kampanye tidak boleh menggantikan data; dan visualisasi tidak boleh menghilangkan ketidakpastian. Dalam konteks disclosure, Ben-Shahar dan Schneider mengingatkan bahwa kewajiban pengungkapan sering gagal karena penerima informasi tidak otomatis membaca, memahami, atau menggunakan informasi yang diberikan.[26] Oleh sebab itu, transparansi linguistik harus dipadukan

[23] United Nations Sustainable Development Group, Communicating Together: Guidelines for UNCT Communications on the SDGs (New York: UNSDG, January 2022).

[24] World Justice Project, "Dimensions of the WJP Open Government Index," diakses 24 Juni 2026, https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-open-government-index/dimensions-wjp-open-government-index.

[25] OECD, OECD Report on Public Communication: The Global Context and the Way Forward (Paris: OECD Publishing, 2021), https://doi.org/10.1787/22f8031c-en.

[26] Omri Ben-Shahar and Carl E. Schneider, More Than You Wanted to Know: The Failure of Mandated Disclosure (Princeton: Princeton University Press, 2014).

dengan desain pilihan, bantuan pengguna, pengujian pemahaman, dan penyederhanaan substantif bila aturan memang terlalu kompleks.

Hasil kelima adalah model LTSG dapat menjadi alat diagnosis lintas domain. Ia mengajukan lima pertanyaan: apakah teks mudah dibaca; apakah makna dan data dapat ditelusuri; apakah pembaca tahu apa yang harus dilakukan; apakah kelompok berbeda dapat mengakses pesan; dan apakah narasi menyampaikan risiko serta batasan secara jujur? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat diterapkan pada surat ketetapan pajak, naskah undang-undang, catatan atas laporan keuangan, laporan keberlanjutan, dashboard SDGs, maupun pengumuman pelayanan publik.

Bagian ini menjawab rumusan masalah dengan menghubungkan hasil sintesis ke empat domain. Rumusan masalah pertama menyangkut definisi transparansi linguistik sebagai prasyarat tata kelola berkelanjutan. Transparansi linguistik berbeda dari keterbukaan dokumen. Keterbukaan dokumen menjawab pertanyaan 'apakah informasi tersedia', sedangkan transparansi linguistik menjawab pertanyaan 'apakah informasi tersebut dapat dipakai secara benar oleh audiens yang tepat'. Perbedaan ini penting karena governance modern sering tenggelam dalam produksi dokumen. Semakin banyak dokumen tidak selalu berarti semakin transparan apabila pembaca tidak dapat membedakan informasi kunci, memahami istilah, atau menemukan konsekuensi keputusan. Definisi LTSG juga mengoreksi pemahaman sempit tentang plain language. Bahasa jelas bukan bahasa dangkal. Dalam dokumen pajak, misalnya, kata sederhana tetap harus menunjukkan dasar hukum dan kondisi pengecualian. Dalam peraturan, struktur yang lebih mudah dibaca tetap harus menjaga hierarki norma. Dalam laporan keuangan, narasi yang lugas tetap harus menyampaikan ketidakpastian estimasi dan risiko material. Dalam komunikasi SDGs, pesan yang mudah diingat tetap harus memuat data, tanggung jawab, dan ajakan tindakan yang konkret. Dengan demikian, transparansi linguistik adalah seni institusional untuk membuat kompleksitas dapat dinavigasi, bukan membuat kompleksitas seolah-olah tidak ada.

Rumusan masalah kedua menanyakan bukti lintas bidang. Bidang pajak menunjukkan hubungan paling langsung antara bahasa dan kepatuhan. Jika wajib pajak salah memahami definisi, prosedur, atau tenggat, biaya administrasi meningkat bagi dua pihak: wajib pajak menanggung denda atau kebutuhan konsultasi, sementara otoritas pajak menanggung biaya koreksi dan sengketa. OECD menunjukkan bahwa membuat kepatuhan lebih mudah, termasuk melalui bahasa sederhana, dapat mengurangi ketidakpatuhan tidak disengaja.[27] Dalam kerangka tax morale, bahasa jelas juga dapat mengubah pengalaman pajak dari 'dipaksa membayar' menjadi 'dipandu untuk berkontribusi'. Hak wajib pajak atas penjelasan yang jelas, sebagaimana tampak dalam Taxpayer Bill of Rights IRS, memperlihatkan bahwa informasi bukan layanan tambahan, melainkan bagian dari fairness administratif.[28] Namun bidang pajak juga menunjukkan batas bahasa sederhana. Blank dan Osofsky mengingatkan bahwa penjelasan yang terlalu sederhana dapat menciptakan simplexity, yaitu kesan bahwa hukum sederhana padahal substansinya tetap kompleks.[29] Dalam model LTSG, risiko ini ditangani melalui dimensi akuntabilitas naratif dan keterlacakan semantik. Otoritas pajak boleh menyajikan ringkasan yang mudah, tetapi ringkasan harus memperlihatkan batasan, pengecualian umum, dan jalur menuju penjelasan teknis. Ringkasan harus berfungsi sebagai peta, bukan tirai.

[27] OECD, Understanding and Influencing Taxpayers' Compliance Behaviour (Paris: OECD Publishing, 2012), 5.
[28] Internal Revenue Service, "Taxpayer Bill of Rights," terakhir diperbarui 22 Mei 2026, diakses 24 Juni 2026, https://www.irs.gov/taxpayer-bill-of-rights.
[29] Joshua D. Blank and Leigh Osofsky, "Simplexity: Plain Language and the Tax Law," Emory Law Journal 66, no. 2 (2017): 189-243.

Bidang hukum menunjukkan bahwa transparansi linguistik adalah bagian dari akses keadilan. Hukum mengikat semua orang, tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan membaca dokumen hukum. Ketika peraturan menggunakan kalimat panjang, definisi berputar, atau rujukan silang yang tidak dijelaskan, warga kehilangan kemampuan memprediksi konsekuensi tindakan. Indonesia sebenarnya telah memiliki mandat kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan. Tantangan utamanya adalah operasionalisasi: bagaimana menguji bahwa rancangan peraturan benar-benar dapat dimengerti oleh pelaksana, warga, pelaku usaha kecil, kelompok rentan, dan aparat di daerah?

Analisis hukum juga memperlihatkan pentingnya struktur. Banyak peraturan gagal jelas bukan karena pilihan kata semata, tetapi karena arsitektur informasi buruk. Ketentuan umum, larangan, pengecualian, sanksi, dan prosedur keberatan sering tersebar sehingga pembaca harus membuat peta sendiri. Transparansi linguistik menuntut desain dokumen: judul yang informatif, alur logis, daftar definisi yang konsisten, contoh, bagan proses, dan ringkasan nonnormatif yang tidak menggantikan teks resmi. Dengan kata lain, legal drafting perlu berkolaborasi dengan information design.

Bidang akuntansi memperlihatkan bahwa bahasa menentukan kualitas keputusan ekonomi. Angka keuangan tidak pernah berbicara sendiri. Estimasi, kebijakan akuntansi, risiko likuiditas, asumsi going concern, segmen operasi, dan kontinjensi hukum semuanya dijelaskan melalui bahasa[30]. Jika narasi terlalu kompleks atau terlalu defensif, pembaca mungkin gagal menilai risiko.[31] Literatur financial disclosure menunjukkan bahwa keterbacaan dan kompleksitas laporan memiliki konsekuensi terhadap pemrosesan informasi oleh investor.[32] Oleh karena itu, transparansi linguistik dalam akuntansi adalah bagian dari perlindungan investor dan efisiensi pasar.

Dalam pelaporan keberlanjutan, tantangan bertambah karena laporan harus melayani banyak pengguna: investor, pekerja, komunitas terdampak, regulator, konsumen, dan masyarakat sipil. GRI berfokus pada dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia,[33] sedangkan IFRS S1 berfokus pada informasi keberlanjutan yang berguna bagi pengguna laporan keuangan umum dalam menilai prospek entitas.[34] Kedua pendekatan memiliki audiens dan materialitas yang tidak selalu sama. Transparansi linguistik diperlukan agar organisasi tidak mencampuradukkan klaim dampak sosial dengan klaim risiko finansial. Pembaca harus dapat membedakan apa yang merupakan target, apa yang merupakan realisasi, apa yang merupakan estimasi, dan apa yang merupakan aspirasi.

Bidang SDGs memperlihatkan dimensi partisipatif dari bahasa. Agenda SDGs sering dikomunikasikan melalui ikon, warna, slogan, dan narasi optimistis. Strategi ini berguna untuk membangun pengenalan publik, tetapi tidak cukup untuk membangun akuntabilitas. Komunikasi SDGs yang transparan harus menghubungkan tujuan global dengan indikator yang terukur, aktor yang bertanggung jawab, waktu pelaksanaan, wilayah terdampak, dan pilihan kebijakan.

[30] Feng Li, Ibid.
[31] Tim Loughran and Bill McDonald, Ibid.
[32] Haifeng You and Xiao-jun Zhang, Ibid.
[33] Global Reporting Initiative, GRI 1: Foundation 2021 (Amsterdam: Global Reporting Initiative, 2021).
[34] IFRS Foundation, "IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information," issued June 2023, effective 1 January 2024, diakses 24 Juni 2026, https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s1-general-requirements/.

Metadata indikator UNSD penting karena menjelaskan apa yang sebenarnya diukur.[35] Tanpa penjelasan seperti ini, publik dapat mengira bahwa satu angka mewakili seluruh kenyataan sosial.

Komunikasi SDGs juga harus berhati-hati terhadap greenwashing dan SDG-washing. Organisasi dapat memakai logo SDGs untuk memberi kesan keberlanjutan tanpa menunjukkan kontribusi nyata atau dampak negatif. Dimensi akuntabilitas naratif dalam LTSG menuntut pesan SDGs menyampaikan keterbatasan, konflik tujuan, dan kelompok yang tertinggal. Misalnya, proyek infrastruktur dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi menimbulkan risiko lingkungan atau penggusuran. Komunikasi yang berkelanjutan tidak menyembunyikan trade-off, melainkan menjelaskan bagaimana trade-off tersebut dinilai dan dimitigasi.

Rumusan masalah ketiga menyangkut dimensi konseptual. Lima dimensi LTSG dapat diterapkan secara bertahap. Pada tahap pertama, organisasi melakukan pemetaan audiens: siapa pembaca utama, keputusan apa yang harus mereka buat, dan konteks literasi apa yang mereka miliki. Pada tahap kedua, organisasi menyederhanakan struktur: informasi paling penting ditempatkan awal, istilah teknis didefinisikan, dan langkah tindakan disusun berurutan. Pada tahap ketiga, organisasi memastikan keterlacakan: setiap klaim penting memiliki dasar hukum, data, metode, atau rujukan yang jelas. Pada tahap keempat, organisasi menguji pemahaman melalui pembaca nyata. Pada tahap kelima, organisasi membuka mekanisme umpan balik dan koreksi. Tabel 1 berikut menunjukkan bagaimana dimensi LTSG dapat diterjemahkan ke dalam indikator lintas domain. Indikator ini tidak dimaksudkan sebagai daftar final, tetapi sebagai prototipe audit bahasa untuk organisasi.

Tabel 1. Matriks Bukti Konseptual Lintas Domain

Domain	**Masalah linguistik khas**	**Akibat governance**	**Aplikasi LTSG**
Pajak	Formulir rumit, istilah tidak dijelaskan, instruksi tersebar	Kesalahan tidak disengaja, sengketa, turunnya tax morale	Peta perjalanan wajib pajak, ringkasan tindakan, contoh penghitungan
Hukum	Legalese, definisi tidak konsisten, rujukan silang berlapis	Akses keadilan lemah, interpretasi beragam	Uji keterpahaman, struktur norma jelas, penjelasan nonnormatif
Akuntansi	Narasi defensif, disclosure overload, istilah teknis tanpa konteks	Asimetri informasi, reaksi pasar lambat	Bahasa risiko seimbang, koneksi angka-narasi, ringkasan materialitas
SDGs	Slogan tanpa indikator, data tanpa cerita, klaim keberlanjutan umum	Partisipasi semu, SDG-washing, akuntabilitas lemah	Komunikasi berbasis indikator, aktor, anggaran, dan trade-off

[35] United Nations Statistics Division, "SDG Indicators: Metadata Repository," diakses 24 Juni 2026, https://unstats.un.org/sdgs/metadata/.

Rumusan masalah keempat menanyakan batasan dan rekomendasi. Batasan pertama adalah ketegangan antara presisi dan keterpahaman. Presisi teknis tetap penting karena bahasa yang terlalu umum dapat menimbulkan sengketa. Solusinya bukan memilih antara presisi atau keterpahaman, melainkan menyediakan lapisan komunikasi. Dokumen utama mempertahankan presisi, sedangkan ringkasan, FAQ, infografik, dan contoh kasus membantu audiens menavigasi dokumen utama. Lapisan tambahan harus konsisten dengan teks resmi dan mencantumkan batasnya.

Batasan kedua adalah multilingualisme dan ketimpangan literasi. Dalam masyarakat majemuk, bahasa Indonesia baku mungkin belum cukup bagi semua kelompok. Komunikasi pajak untuk usaha mikro, peraturan layanan publik untuk warga desa, atau pesan SDGs untuk komunitas adat membutuhkan adaptasi bahasa dan media. Transparansi linguistik berarti audiens yang berbeda mendapatkan akses makna yang setara, bukan selalu menerima teks yang identik. Ini dapat dilakukan melalui terjemahan, bahasa isyarat, audio, visual, simulasi, dan pendampingan. Batasan ketiga adalah digitalisasi. Digitalisasi sering dipandang sebagai solusi transparansi karena informasi lebih mudah dipublikasikan. Namun, antarmuka digital dapat memperburuk ketidakjelasan jika menu tidak intuitif, istilah tidak konsisten, chatbot memberi jawaban tanpa dasar hukum, atau dashboard menampilkan angka tanpa konteks. Dalam kerangka LTSG, aplikasi digital perlu diaudit seperti dokumen tertulis: apakah pengguna dapat menemukan informasi, memahami konsekuensi, dan menyelesaikan tindakan tanpa bantuan ahli? Batasan keempat adalah insentif institusional. Organisasi kadang tidak memiliki insentif untuk menulis jelas karena bahasa kabur memberi ruang defensif. Narasi yang ambigu dapat mengurangi risiko komitmen, menunda kritik, atau membuat tanggung jawab sulit dilacak. Karena itu, transparansi linguistik membutuhkan tata kelola internal: penanggung jawab bahasa, standar editorial, uji pengguna, keterlibatan ahli substansi dan ahli komunikasi, serta kewajiban menjawab umpan balik publik.

Dalam konteks pajak, rekomendasi utama adalah menyusun peta komunikasi berbasis perjalanan wajib pajak. Setiap tahap--registrasi, penghitungan, pembayaran, pelaporan, keberatan, restitusi, dan pemeriksaan--perlu dokumen yang berbeda dan indikator keberhasilan yang berbeda. Surat formal tetap perlu dasar hukum, tetapi harus disertai ringkasan tindakan: apa yang terjadi, mengapa, apa yang harus dilakukan wajib pajak, sampai kapan, bukti apa yang diperlukan, dan ke mana bertanya. Prinsip ini dapat menurunkan beban administrasi dan memperkuat kepatuhan sukarela.

Dalam konteks hukum, rekomendasi utama adalah memasukkan uji keterpahaman ke dalam proses pembentukan peraturan. Naskah akademik dan harmonisasi sebaiknya tidak hanya menilai substansi dan legalitas, tetapi juga struktur bahasa. Pembentuk peraturan dapat menggunakan pembaca uji dari kelompok pelaksana dan warga terdampak. Hasil uji tidak mengikat secara mutlak, tetapi menjadi bukti bahwa asas kejelasan rumusan diuji secara nyata.

Dalam konteks akuntansi dan laporan keberlanjutan, rekomendasi utama adalah menggabungkan materialitas dengan keterpahaman. Laporan harus menjelaskan mengapa suatu informasi material, bagaimana data diperoleh, apa batas pengukuran, dan apa konsekuensinya bagi pengguna. Narasi risiko harus seimbang: tidak menakut-nakuti, tetapi juga tidak menenangkan secara berlebihan. Penggunaan tabel, grafik, dan ringkasan eksekutif harus membantu analisis, bukan menggantikan penjelasan metodologis.

Dalam konteks komunikasi SDGs, rekomendasi utama adalah mengubah komunikasi dari kampanye umum menjadi percakapan akuntabel. Pesan SDGs perlu menjelaskan hubungan antara target, indikator, program, anggaran, dan dampak. Warga perlu mengetahui bukan hanya

bahwa suatu program mendukung SDG tertentu, tetapi juga bagaimana dukungan itu diukur dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Komunikasi SDGs yang baik tidak sekadar membuat orang merasa positif; ia membuat orang mampu bertanya dan berpartisipasi.

Secara umum, artikel ini menyarankan pembentukan linguistic transparency audit. Audit ini dapat dilakukan sebelum dokumen diterbitkan dan setelah dokumen digunakan. Sebelum terbit, audit menilai struktur, istilah, risiko ambiguitas, konsistensi, dan kesesuaian audiens. Setelah terbit, audit menilai keluhan, frekuensi salah paham, waktu penyelesaian tindakan, pertanyaan berulang, sengketa, serta hasil uji pemahaman. Dengan cara ini, bahasa menjadi bagian dari siklus perbaikan tata kelola.

OECD Government at a Glance 2025 menekankan pentingnya tata kelola yang memperkuat kepercayaan, akuntabilitas, layanan publik yang berpusat pada manusia, dan partisipasi dalam pembentukan kebijakan.[36] Transparansi linguistik sejalan dengan agenda tersebut karena ia memulihkan martabat warga dalam interaksi dengan institusi. Warga yang diberi penjelasan jelas diperlakukan sebagai peserta governance, bukan sekadar penerima perintah.

D. Kesimpulan

Transparansi linguistik merupakan prasyarat tata kelola berkelanjutan, yang bukan sekadar gaya penulisan, melainkan kapasitas institusional untuk membuat aturan, data, risiko, hak, kewajiban, dan tujuan publik dapat dipahami serta digunakan. Bukti dari pajak, hukum, akuntansi, dan komunikasi SDGs menunjukkan pola yang konsisten: ketika bahasa kabur, biaya kepatuhan meningkat, akses keadilan melemah, asimetri informasi membesar, dan partisipasi publik menjadi dangkal. Sebaliknya, ketika bahasa jelas, dapat ditelusuri, berguna, inklusif, dan jujur, institusi memiliki peluang lebih besar untuk membangun kepercayaan, legitimasi, dan akuntabilitas. Model LTSG yang diajukan artikel ini menawarkan lima dimensi untuk menilai transparansi linguistik: kejelasan leksikal-sintaktik, keterlacakan semantik, kegunaan pragmatik, inklusivitas diskursif, dan akuntabilitas naratif. Model ini dapat dipakai lintas domain karena memusatkan perhatian pada fungsi komunikasi, bukan pada jenis dokumen semata. Ia dapat diterapkan pada surat pajak, rancangan undang-undang, putusan, prospektus, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dashboard SDGs, maupun kampanye publik.

Berdasarkan Kesimpulan yang ada, kajian ini menghasilkan beebrapa saran. Saran bagi pemerintah adalah menjadikan transparansi linguistik sebagai bagian dari reformasi birokrasi, keterbukaan informasi, dan pelayanan publik. Setiap dokumen yang berdampak pada hak dan kewajiban warga sebaiknya memiliki ringkasan tindakan, definisi istilah, jalur keberatan, dan uji keterpahaman. Saran bagi pembentuk peraturan adalah memasukkan audit bahasa dalam legal drafting, tanpa melemahkan presisi hukum. Saran bagi otoritas pajak adalah mendesain komunikasi berbasis perjalanan wajib pajak dan mengukur keberhasilan melalui pengurangan kesalahan tidak disengaja serta pertanyaan berulang. Saran bagi regulator dan perusahaan adalah memperlakukan narasi akuntansi dan keberlanjutan sebagai ruang akuntabilitas, bukan sekadar kepatuhan format. Pengungkapan harus menjelaskan materialitas, metode, ketidakpastian, dan trade-off secara seimbang. Saran bagi pengelola komunikasi SDGs adalah menghubungkan pesan inspiratif dengan indikator, anggaran, tanggung jawab, dan forum partisipasi. Akhirnya, saran bagi penelitian berikutnya adalah menguji model LTSG secara empiris melalui analisis korpus dokumen, eksperimen keterpahaman, survei pengguna, dan studi kasus

[36] OECD, Government at a Glance 2025 (Paris: OECD Publishing, 2025), https://doi.org/10.1787/0efd0bcd-en.

institusi. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan indeks transparansi linguistik untuk membandingkan dokumen antar sektor dan memantau perbaikan dari waktu ke waktu.

Keterbatasan artikel ini adalah sifatnya yang konseptual sehingga belum menguji hubungan kausal antara transparansi linguistik dan indikator governance tertentu. Namun, sintesis lintas bidang yang disajikan memberikan dasar teoritis yang kuat untuk riset empiris berikutnya. Dalam era ketika tata kelola semakin berbasis dokumen digital, dashboard, formulir daring, dan laporan keberlanjutan, pertanyaan kunci bukan lagi hanya 'apakah informasi dibuka', melainkan 'apakah informasi itu memampukan publik memahami dan bertindak'. Itulah inti transparansi linguistik dalam tata kelola berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Ben-Shahar, O., & Schneider, C. E. (2014). *More than you wanted to know: The failure of mandated disclosure*. Princeton University Press.

Blank, J. D., & Osofsky, L. (2017). Simplexity: Plain language and the tax law. *Emory Law Journal, 66*(2), 189–243.

Global Reporting Initiative. (2021). *GRI 1: Foundation 2021*. Global Reporting Initiative.

IFRS Foundation. (2023). *IFRS S1 general requirements for disclosure of sustainability-related financial information* (Terbit Juni 2023, berlaku 1 Januari 2024). Diakses 24 Juni 2026, dari https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s1-general-requirements/

Internal Revenue Service. (2026). *Taxpayer bill of rights* (Terakhir diperbarui 22 Mei 2026). Diakses 24 Juni 2026, dari https://www.irs.gov/taxpayer-bill-of-rights

International Accounting Standards Board. (2018). *Conceptual framework for financial reporting*. IFRS Foundation.

International Organization for Standardization. (2023). *ISO 24495-1:2023, Plain language—Part 1: Governing principles and guidelines*. ISO.

International Plain Language Federation. (n.d.). *Plain language definitions*. Diakses 24 Juni 2026, dari https://www.iplfederation.org/plain-language-definitions/

Li, F. (2008). Annual report readability, current earnings, and earnings persistence. *Journal of Accounting and Economics, 45*(2–3), 221–247. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2008.02.003

Loughran, T., & McDonald, B. (2014a). Measuring readability in financial disclosures. *Journal of Finance, 69*(4), 1643–1671. https://doi.org/10.1111/jofi.12162

Loughran, T., & McDonald, B. (2014b). Regulation and financial disclosure: The impact of plain English. *Journal of Regulatory Economics, 45*(1), 94–113. https://doi.org/10.1007/s11149-013-9236-5

Mellinkoff, D. (1963). *The language of the law*. Little, Brown and Company.

OECD. (2012). *Understanding and influencing taxpayers' compliance behaviour*. OECD Publishing.

OECD. (2019). *Tax morale: What drives people and businesses to pay tax?* OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/f3d8ea10-en

OECD. (2021). *OECD report on public communication: The global context and the way forward*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/22f8031c-en

OECD. (2025). *Government at a glance 2025*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/oefdobcd-en

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*. OJK.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
Tiersma, P. M. (1999). *Legal language*. University of Chicago Press.
United Nations Statistics Division. (2025). *The sustainable development goals report 2025*. United Nations.
United Nations Statistics Division. (n.d.). *SDG indicators: Metadata repository*. Diakses 24 Juni 2026, dari https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
United Nations Sustainable Development Group. (2022, Januari). *Communicating together: Guidelines for UNCT communications on the SDGs*. UNSDG.
U.S. Securities and Exchange Commission. (1998). *A plain English handbook: How to create clear SEC disclosure documents*. SEC.
U.S. Securities and Exchange Commission. (1998). *Plain English disclosure* (Securities Act Release No. 33-7497). Diakses 24 Juni 2026, dari https://www.sec.gov/rules-regulations/1998/01/plain-english-disclosure
World Justice Project. (n.d.). *Dimensions of the WJP Open Government Index*. Diakses 24 Juni 2026, dari https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-open-government-index/dimensions-wjp-open-government-index
You, H., & Zhang, X. (2009). Financial reporting complexity and investor underreaction to 10-K information. *Review of Accounting Studies, 14*(4), 559–586. https://doi.org/10.1007/s11142-008-9083-2